

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional, guru menjadi elemen sentral yang menentukan keberhasilan proses pendidikan karena berperan langsung dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermutu. Kualitas guru berdampak signifikan terhadap pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga peningkatan kompetensi profesional guru menjadi agenda prioritas dalam upaya perbaikan mutu pendidikan. Kompetensi profesional guru tidak hanya ditentukan oleh kualifikasi akademik, tetapi juga oleh kemampuan pedagogik, penguasaan materi bidang studi, sikap profesional, serta komitmen terhadap pengembangan diri secara berkelanjutan.

Secara yuridis, urgensi peningkatan kompetensi profesional guru ditegaskan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana serta menguasai kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, serta mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru mengamanatkan pengembangan komunitas profesi guru sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, salah satunya melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Amanat tersebut diperkuat dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang secara eksplisit menetapkan standar kompetensi guru, khususnya kompetensi profesional yang mencakup penguasaan materi ajar, metode pembelajaran, serta sistem penilaian sesuai dengan bidang keilmuan yang diampu. Selain itu, MGMP juga diakui sebagai bagian dari kegiatan pengembangan keprofesian guru sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, yang menegaskan bahwa keikutsertaan guru dalam MGMP merupakan bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan.

Dalam konteks pembelajaran Seni Budaya, kebijakan pendidikan nasional tersebut membawa implikasi yang semakin besar terhadap tuntutan kompetensi profesional guru. Guru Seni Budaya dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengelola pembelajaran yang berbasis praktik, ekspresi, kreativitas, dan apresiasi seni. Pemberlakuan Kurikulum Merdeka semakin menegaskan tuntutan tersebut, karena guru dituntut mampu menyusun perangkat ajar yang fleksibel, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, mendorong kreativitas peserta didik, serta melaksanakan asesmen autentik terhadap proses dan hasil berkesenian. Tuntutan ini mensyaratkan guru Seni Budaya memiliki keterampilan praktik seni yang memadai, baik dalam bidang seni rupa, musik, tari, maupun teater.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kompetensi profesional guru Seni Budaya. Dalam perspektif pengembangan profesional guru, MGMP diposisikan sebagai komunitas belajar profesional (*Professional Learning Community*) yang memungkinkan guru untuk belajar secara kolaboratif. Muslich (2011: 37–39) memandang MGMP sebagai forum kolektif guru mata pelajaran yang berfungsi sebagai wadah diskusi, berbagi pengalaman, dan pemecahan berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelas.

Peran strategis MGMP tersebut diperkuat oleh Mulyasa (2013: 181–184) yang menegaskan bahwa MGMP merupakan bagian integral dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru. MGMP dipandang sebagai sarana yang efektif dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru melalui kegiatan yang terencana dan sistematis, seperti workshop, pelatihan, pendampingan, serta pengembangan perangkat pembelajaran. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, guru memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman kurikulum, memperbaiki praktik pembelajaran, serta mengadaptasi berbagai inovasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Namun demikian, kondisi ideal ketersediaan guru Seni Budaya yang kompeten dan sesuai dengan latar belakang keilmuan belum sepenuhnya terpenuhi di wilayah Komda Majenang. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemdikdasmen, wilayah ini memiliki 42 SMP yang terdiri atas 18 SMP Negeri dan 24 SMP Swasta. Hasil pemetaan MGMP Seni Budaya Komda Majenang menunjukkan bahwa hanya 26 guru yang memiliki latar belakang pendidikan seni

secara formal, meliputi Seni Rupa, Musik, Tari, dan Teater, sementara selebihnya mata pelajaran Seni Budaya diampu oleh guru dari bidang studi lain akibat keterbatasan tenaga pendidik yang sesuai.

Secara konseptual, kondisi tersebut seharusnya dapat diatasi melalui pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya yang efektif dan berkelanjutan. MGMP diposisikan sebagai komunitas belajar profesional yang berfungsi memfasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui kegiatan diskusi, pelatihan, berbagi praktik baik, serta pendampingan pembelajaran, khususnya dalam menjembatani kesenjangan kompetensi antara guru berlatar belakang pendidikan seni dan guru non-latar seni.

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa pengelolaan MGMP Seni Budaya Komda Majenang belum berjalan secara optimal. Program kegiatan MGMP masih bersifat insidental dan belum disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan kompetensi guru, sehingga penguatan kompetensi profesional, khususnya bagi guru non-latar seni, belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya kesenjangan kompetensi antar guru dan belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka. Data empirik tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pada kegiatan MGMP Komda Majenang tanggal 12 November 2025 di SMP Negeri 1 Majenang serta wawancara dengan Ketua dan pengurus MGMP pada 3 Januari 2026, yang selanjutnya disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Awal Pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Seni Budaya Komda Majenang

No	Aspek	Target	Ketercapaian
1	<i>Plan</i> (Perencanaan Pengelolaan MGMP)	100 %	75 %
2	<i>Do</i> (Pelaksanaan kegiatan MGMP)	100 %	70%
3	<i>Cek</i> (Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan MGMP)	100 %	65%
4	<i>Action</i> (Tindak Lanjut dari Evaluasi Kegiatan MGMP)	100 %	50%
	Rata-Rata	100 %	65 %

Sumber: MGMP Komda Majenang tahun 2025

Tabel 1.1 menyajikan gambaran kondisi awal pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya Komda Majenang berdasarkan tahapan siklus PDCA (*Plan*, *Do*, *Check*, dan *Action*) sebagai kerangka analisis manajemen berkelanjutan. Persentase yang ditampilkan dalam tabel ini tidak dimaksudkan sebagai hasil pengukuran kuantitatif atau analisis statistik, melainkan sebagai indikator deskriptif untuk mempermudah pemetaan tingkat keterlaksanaan setiap tahapan pengelolaan MGMP berdasarkan temuan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Target 100% merepresentasikan kondisi ideal pengelolaan MGMP yang berjalan optimal, sedangkan capaian aktual menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Pada aspek *Plan* (perencanaan pengelolaan MGMP), tingkat keterlaksanaan berada pada kisaran 75%. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan MGMP

telah dilakukan, antara lain melalui penyusunan program kerja, penetapan agenda kegiatan, dan perumusan tujuan MGMP. Namun demikian, perencanaan tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan kompetensi guru Seni Budaya secara komprehensif dan belum seluruh program dirancang secara sistematis untuk menjawab tuntutan Kurikulum Merdeka.

Aspek *Do* (pelaksanaan kegiatan MGMP) menunjukkan tingkat keterlaksanaan sekitar 70%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan MGMP, seperti pertemuan rutin, diskusi pembelajaran, dan kegiatan pengembangan kompetensi guru, telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut belum berlangsung secara konsisten dan merata, baik dari segi intensitas, variasi kegiatan, maupun partisipasi seluruh anggota MGMP.

Pada aspek *Check* (evaluasi pelaksanaan kegiatan MGMP), tingkat keterlaksanaan berada pada kisaran 65%. Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kegiatan MGMP telah dilakukan, tetapi masih bersifat terbatas dan belum terstruktur. Evaluasi umumnya dilakukan melalui diskusi reflektif secara informal dan belum didukung oleh instrumen evaluasi yang sistematis serta terdokumentasi, sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program MGMP.

Aspek *Action* (tindak lanjut hasil evaluasi) menunjukkan tingkat keterlaksanaan paling rendah, yaitu sekitar 50%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tindak lanjut terhadap hasil evaluasi MGMP belum berjalan secara optimal. Rekomendasi hasil evaluasi belum secara konsisten ditransformasikan ke dalam

program perbaikan atau pengembangan kegiatan MGMP yang berkelanjutan, sehingga siklus PDCA belum terlaksana secara utuh.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat keterlaksanaan pengelolaan MGMP Seni Budaya berdasarkan siklus PDCA berada pada kisaran 65%. Secara kualitatif, temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan MGMP berada pada kategori cukup, namun masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek evaluasi dan tindak lanjut. Dengan memperkuat tahapan *Check* dan *Action*, pengelolaan MGMP diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya.

Secara teoretis, pentingnya penguasaan kompetensi seni pada guru ditegaskan oleh para ahli pendidikan seni dan pendidikan profesional. Efland (2002: 12–15) menyatakan bahwa pendidikan seni menuntut adanya integrasi yang utuh antara pengetahuan seni (*art knowledge*), keterampilan teknik berkesenian (*artistic skills*), dan pemaknaan estetika (*aesthetic understanding*). Guru seni tidak hanya berperan sebagai penyampai teori, tetapi juga sebagai fasilitator pengalaman estetik dan praktik kreatif yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan gagasan serta mengembangkan sensitivitas artistiknya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sahabuddin (2019: 87–90) menegaskan bahwa guru Seni Budaya dituntut memiliki kompetensi kreatif, apresiatif, dan ekspresif. Kompetensi tersebut diperlukan agar guru mampu membimbing peserta didik dalam proses penciptaan karya seni, mengapresiasi karya seni secara kritis, serta mengekspresikan nilai-nilai budaya dan estetika melalui berbagai bentuk seni.

Tanpa penguasaan keterampilan praktik seni yang memadai, proses pembelajaran seni berpotensi menjadi teoritis dan kehilangan esensi pengalaman artistiknya.

Berdasarkan tuntutan tersebut, penting untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat kompetensi profesional guru Seni Budaya di wilayah Komda Majenang. Oleh karena itu, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data awal melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilaksanakan pada kegiatan rutin guru Seni Budaya di wilayah Komda Majenang tanggal 12 November 2025. Data awal tersebut digunakan untuk memetakan kondisi faktual kompetensi profesional guru sebagai dasar analisis lebih lanjut. Gambaran awal kompetensi profesional guru Seni Budaya di MGMP Komda Majenang selanjutnya disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Kompetensi Profesional Guru MGMP Seni Budaya
Komda Majenang Tahun 2025

No	Aspek Kompetensi Profesional	Target	Keberhasilan (Data Awal)
1	Penguasaan Materi dan Konsep Seni Budaya	100%	75%
2	Keterampilan Praktik dan Proses Kreatif Seni	100%	70%
3	Perancangan dan Pelaksanaan Pembelajaran Seni	100%	65%
4	Penilaian dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan	100%	55%
Rata-Rata		100 %	66,25%

Sumber : MGMP Komda Majenang tahun 2025

Tabel 1.2 menyajikan gambaran data awal kompetensi profesional guru Seni Budaya yang tergabung dalam MGMP Komda Majenang Tahun 2025. Kolom target menunjukkan kondisi ideal kompetensi profesional guru yang diharapkan tercapai secara penuh (100%) sesuai dengan ketentuan kompetensi guru dan teori pendidikan seni, sedangkan kolom tingkat keterlaksanaan menunjukkan kondisi faktual awal yang diperoleh melalui observasi pendahuluan, wawancara dengan pengurus MGMP, serta studi dokumentasi kegiatan MGMP. Persentase dalam tabel ini digunakan sebagai indikator deskriptif untuk mempermudah pemetaan kondisi awal, bukan sebagai hasil pengukuran kuantitatif atau analisis statistik, sehingga seluruh data diinterpretasikan secara kualitatif.

Pada aspek penguasaan materi dan konsep Seni Budaya, tingkat keterlaksanaan mencapai 75%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah memiliki pemahaman dasar terhadap materi dan konsep Seni Budaya, termasuk pemahaman umum mengenai seni sebagai ekspresi budaya. Namun demikian, masih ditemukan keterbatasan pada sebagian guru, khususnya guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan seni, dalam pendalaman konsep dan keterkaitan antar cabang seni. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual, sehingga diperlukan penguatan penguasaan materi melalui kegiatan MGMP yang lebih terarah dan sistematis.

Aspek keterampilan praktik dan proses kreatif seni menunjukkan tingkat keterlaksanaan sebesar 70%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan praktik seni telah dilaksanakan dalam pembelajaran, namun belum berjalan secara optimal dan merata. Beberapa guru masih mengalami keterbatasan dalam penguasaan teknik

berkesenian dan pendampingan proses kreatif peserta didik, sehingga pembelajaran seni cenderung lebih menekankan aspek teoretis dibandingkan praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi praktik seni guru masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berbasis praktik dan pendampingan berkelanjutan dalam forum MGMP.

Pada aspek perancangan dan pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya, tingkat keterlaksanaan berada pada angka 65%. Capaian ini menunjukkan bahwa guru pada umumnya telah memiliki perangkat pembelajaran, seperti modul ajar dan rencana pembelajaran. Namun, implementasi pembelajaran di kelas masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengembangkan pembelajaran yang kontekstual, kreatif, serta berbasis proyek sebagaimana dituntut dalam Kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran Seni Budaya yang lebih bermakna melalui kegiatan MGMP.

Aspek penilaian dan pengembangan profesional berkelanjutan menunjukkan tingkat keterlaksanaan terendah, yaitu sebesar 55%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penilaian pembelajaran Seni Budaya masih didominasi oleh penilaian hasil akhir, sementara penilaian terhadap proses kreatif belum diterapkan secara konsisten. Selain itu, MGMP belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai wahana pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, baik dalam bentuk pendampingan, refleksi pembelajaran, maupun berbagi praktik baik. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa aspek penilaian dan pengembangan profesional memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan MGMP.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat keterlaksanaan kompetensi profesional guru Seni Budaya di MGMP Komda Majenang berada pada angka 66,25%. Secara kualitatif, kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru berada pada kategori cukup, namun masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan MGMP Seni Budaya yang lebih efektif, sistematis, dan berkelanjutan agar dapat berfungsi secara optimal sebagai komunitas belajar profesional dalam meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran Seni Budaya.

Penelitian Irnawati (2017) yang juga mengkaji pengelolaan MGMP Seni Budaya jenjang SMA di Kota Cimahi memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan MGMP sebagai sarana peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya. Namun demikian, penelitian yang akan dilakukan menunjukkan perbedaan mendasar, terutama pada fokus kajian dan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian ini secara tegas memfokuskan kajian pada proses pengelolaan MGMP Seni Budaya, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan MGMP sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Seni Budaya. Fokus pada proses pengelolaan MGMP secara komprehensif dan sistematis ini belum dikaji secara mendalam dalam penelitian Irnawati, sehingga menjadi titik pembeda sekaligus kebaruan penelitian.

Selain fokus pada proses, penelitian ini juga memiliki perbedaan konteks dan jenjang pendidikan. Penelitian Irnawati dilaksanakan pada MGMP Seni Budaya jenjang SMA di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada

MGMP Seni Budaya jenjang SMP di wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap. Perbedaan jenjang dan karakteristik wilayah tersebut berimplikasi pada kebutuhan kompetensi profesional guru, dinamika pengelolaan MGMP, serta tantangan pembelajaran Seni Budaya yang dihadapi, khususnya tingginya proporsi guru non-latar belakang pendidikan seni di jenjang SMP. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan konteks empiris yang berbeda dan memperluas kajian pengelolaan MGMP Seni Budaya pada jenjang pendidikan yang relatif belum banyak dikaji.

Perbedaan berikutnya terletak pada kerangka analisis hasil pengelolaan MGMP. Penelitian Irnawati lebih menekankan pada peningkatan kompetensi guru sebagai hasil akhir secara umum, sementara penelitian ini secara jelas membedakan dan menganalisis *output*, *outcome*, dan *impact* pengelolaan MGMP Seni Budaya. *Output* penelitian difokuskan pada produk nyata yang dihasilkan melalui proses pengelolaan MGMP, seperti perangkat ajar Seni Budaya, modul ajar Kurikulum Merdeka, rancangan pembelajaran berbasis proyek, serta media dan bahan ajar seni. *Outcome* penelitian diarahkan pada peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya, khususnya dalam kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Seni Budaya sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Adapun *impact* penelitian dianalisis pada level yang lebih luas, yaitu dampak pengelolaan MGMP terhadap mutu pembelajaran Seni Budaya di sekolah.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki kebaruan dari sisi konteks kebijakan pendidikan. Berbeda dengan penelitian Irnawati yang dilakukan sebelum implementasi Kurikulum Merdeka secara luas, penelitian ini secara eksplisit

mengaitkan proses, *output*, *outcome*, dan *impact* pengelolaan MGMP Seni Budaya dengan tuntutan Kurikulum Merdeka, khususnya pembelajaran berbasis proyek, dan penerapan asesmen autentik dalam pembelajaran Seni Budaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian terdahulu, tetapi juga menghadirkan model analisis pengelolaan MGMP yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran Seni Budaya SMP saat ini.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, kebaruan dan kekuatan penelitian ini terletak pada fokus kajian pengelolaan MGMP Seni Budaya yang menempatkan proses pengelolaan sebagai pusat analisis, serta mengkaji keterkaitannya secara berjenjang dengan *output*, *outcome*, dan *impact* dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana MGMP dikelola dan sejauh mana pengelolaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya dan mutu pembelajaran Seni Budaya di tingkat SMP.

Sejalan dengan tantangan kompetensi guru Seni Budaya di wilayah Komda Majenang serta dukungan regulasi, teori, dan temuan empiris yang menegaskan peran MGMP sebagai wahana pengembangan profesional guru, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan MGMP Seni Budaya Komda Majenang melalui aspek proses, *output*, *outcome*, dan *impact*, dengan tujuan melihat bagaimana pengelolaan MGMP yang efektif dapat memperkuat kompetensi profesional guru, meningkatkan kemampuan

implementasi Kurikulum Merdeka, serta mendorong peningkatan mutu pembelajaran Seni Budaya di SMP wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya dalam meningkatkan kompetensi profesional guru SMP di wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap, yang dikaji secara komprehensif melalui aspek proses, *output*, *outcome*, dan *impact*. Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana pengelolaan MGMP Seni Budaya sebagai sebuah organisasi profesi guru dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan kompetensi guru, tuntutan Kurikulum Merdeka, serta karakteristik pembelajaran Seni Budaya yang menekankan keseimbangan antara aspek pengetahuan dan keterampilan praktik. Penelitian ini akan di fokuskan pada:

1. Proses pengelolaan MGMP Seni Budaya

Proses pengelolaan MGMP Seni Budaya mencakup penerapan fungsi manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) dalam merencanakan program MGMP, mengorganisasikan peran dan tanggung jawab pengurus serta anggota, melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi profesional guru, serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program MGMP. Proses ini dianalisis untuk melihat sejauh mana MGMP dikelola secara efektif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan guru Seni Budaya di wilayah Komda Majenang.

2. *Output* pengelolaan MGMP Seni Budaya

Output pengelolaan MGMP Seni Budaya merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan MGMP, seperti tersusunnya program kerja MGMP, perangkat pembelajaran Seni Budaya yang selaras dengan Kurikulum Merdeka, meningkatnya pemahaman guru terhadap kebijakan dan implementasi kurikulum, serta berkembangnya kompetensi profesional guru, baik dalam penguasaan materi maupun keterampilan praktik kesenian.

3. *Outcome* pengelolaan MGMP Seni Budaya

Outcome pengelolaan MGMP Seni Budaya berupa dampak jangka menengah yang tercermin pada peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya. Peningkatan ini ditunjukkan melalui kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Seni Budaya yang kreatif, inovatif, dan kontekstual sesuai Kurikulum Merdeka.

4. *Impact* pengelolaan MGMP Seni Budaya

Impact pengelolaan MGMP Seni Budaya merupakan dampak jangka panjang terhadap peningkatan mutu pembelajaran Seni Budaya di SMP wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap. Dampak tersebut tercermin pada meningkatnya kualitas proses pembelajaran di kelas, keterlibatan dan apresiasi peserta didik terhadap pembelajaran Seni Budaya, serta penguatan peran MGMP sebagai komunitas belajar profesional yang berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan MGMP Seni Budaya di wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan MGMP?
2. Apa saja *output* yang dihasilkan dari pengelolaan MGMP Seni Budaya di wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru Seni Budaya?
3. Bagaimana *outcome* pengelolaan MGMP Seni Budaya terhadap peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya, khususnya dalam kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Seni Budaya sesuai dengan Kurikulum Merdeka?
4. Bagaimana *impact* pengelolaan MGMP Seni Budaya terhadap mutu pembelajaran Seni Budaya di SMP wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya di wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Seni Budaya. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses pengelolaan MGMP Seni Budaya di wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan MGMP dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru Seni Budaya.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis *output* pengelolaan MGMP Seni Budaya di wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan MGMP dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Seni Budaya.
3. Menganalisis *outcome* pengelolaan MGMP Seni Budaya terhadap peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya, khususnya dalam kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Seni Budaya sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka.
4. Menganalisis *impact* pengelolaan MGMP Seni Budaya terhadap peningkatan mutu pembelajaran Seni Budaya di SMP wilayah Komda Majenang Kabupaten Cilacap.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu manajemen pendidikan dan pengembangan profesional guru, khususnya terkait pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya sebagai komunitas belajar profesional. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai hubungan antara proses pengelolaan MGMP yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut dengan peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan model analisis pengelolaan MGMP berbasis proses, *output*, *outcome*, dan *impact* dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pengurus MGMP Seni Budaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan MGMP Seni Budaya, khususnya dalam merancang program yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya.

b. Bagi Guru Seni Budaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran strategis MGMP sebagai wadah pengembangan kompetensi profesional, sehingga mendorong guru Seni Budaya untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan MGMP guna meningkatkan kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Seni Budaya sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka.

c. Bagi Kepala Sekolah dan Pemangku Kebijakan Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mendukung dan memfasilitasi pengelolaan MGMP Seni Budaya sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, serta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu pembelajaran Seni Budaya di satuan pendidikan.

d. Bagi Dinas Pendidikan dan Pengawas Satuan Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan pembinaan MGMP Seni Budaya, khususnya terkait peningkatan kompetensi profesional guru dan penguatan peran MGMP sebagai komunitas belajar profesional yang efektif dan relevan dengan kebijakan Kurikulum Merdeka.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan MGMP, pengembangan kompetensi profesional guru Seni Budaya, maupun kajian serupa pada jenjang dan konteks wilayah yang berbeda.